

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H. Rokhim Dahuri, *"Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu"*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Koentjaraningrat, *"Metode-metode penelitian di masyarakat"*, Jakarta: PT. Gramedia, 1977.

Soerjono Soekanto, *"Pengantar penelitian hukum"*, Jakarta: UI Pres, 2008.

Emil Salim, *"Laut, sains dan pembangunan"*, Jakarta: Makalah, 2000.

Laksda TNI (Purn) Husein Ibrahim, *"Mengoptimalkan pemanfaatan Potensi Kelautan untuk pemulihan ekonomi nasional"*, Jakarta: Makalah, 2000.

Ronald Nangoi, *"Manajemen sumber daya manusia"*, Jakarta: 1994.

H.A.R. Tilaar, *"Proses peningkatan bagi peningkatan kualitas hidup manusia"*, Jakarta: 1997.

Moeljatno, *"Asas-asas hukum pidana"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *"Asas-asas hukum pidana di Indonesia"*, Bandung: PT. Eresco, 1984.

C.S.T. Kansil *"Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia"*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Hartono Hadisuprpto *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Yogyakarta: 1982.

Moch Lukman FS *"Bagaimana menangkal perkelahian"*, Jakarta: Harian Pelita, 1998.

Sondang P. Siagian *"Filsafat administrasi"*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

"Kamus besar bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Dukungan Polri dalam pelaksanaan pengawasan di laut"*, Jakarta: 2004.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Pemberantasan illegal fishing di wilayah perairan oleh Polri"*, Jakarta: 2008.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Kebijakan Polri berkaitan dengan penegakan hukum perikanan"*, Jakarta: 2008.

Kapolri, *"Pedoman penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan"*, Jakarta: 2006.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Persepsi Polri dalam membangun strategi pengamanan di laut dan perairan wilayah yurisdiksi NKRI"*, Jakarta: 2006.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Membangun kinerja Polair yang didukung segenap komponen bangsa dalam rangka membudayakan tata hukum dan supremasi hukum"*, Jakarta: 2007.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta tegaknya hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi dibidang potensi kelautan"*, Jakarta: 2007.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menyikapi kejahatan dan pencurian ikan oleh kapal nelayan asing di wilayah perairan Indonesia"*, Jakarta: 2007.

Dit Polair Babinkam Polri, *"Berbagai permasalahan penegakan hukum di laut perairan"*, Jakarta: 2004.

Dit Polair Babinkam Polri, *“Strategi penerapan sistem pengamanan pelabuhan, laut dan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, Jakarta: 2005.

Dit Polair Babinkam Polri, *“Dukungan Polri dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan khususnya perikanan”*, Jakarta: 2005.

B. Peraturan perundang-undangan

TAP MPR Republik Indonesia Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR Republik Indonesia Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan bahan peledak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.